

7. Mengarahkan sumber pembiayaan untuk penyelesaian kewajiban, pelayanan dasar, dan program prioritas yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Sasaran Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sasaran kebijakan pembiayaan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 adalah:

1. Tertutupnya defisit anggaran secara sah dan aman;
2. Tersedianya SiLPA yang sesuai hasil audit dan saldo kas;
3. Tidak terbentuknya kewajiban utang baru yang membebani APBD;
4. Terjaganya likuiditas kas sepanjang tahun;
5. Terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah tepat waktu;
6. Terkendalinya SiLPA akhir tahun;
7. Tidak digunakannya dana terikat di luar peruntukan;
8. Terlaksananya pengeluaran pembiayaan secara selektif; serta
9. Terjaganya kesinambungan fiskal jangka menengah.

Kesimpulan

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 difokuskan pada penutupan defisit secara aman melalui penggunaan SiLPA, tanpa menambah kewajiban pinjaman. Defisit anggaran sebesar Rp14,86 miliar direncanakan ditutup oleh penerimaan pembiayaan dalam jumlah yang sama.

Sampai dengan Semester I, terdapat surplus sementara sekitar Rp23,34 miliar karena realisasi belanja masih lebih rendah daripada pendapatan. Surplus tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kelebihan dana akhir tahun karena sebagian besar belanja masih akan direalisasikan pada Semester II.

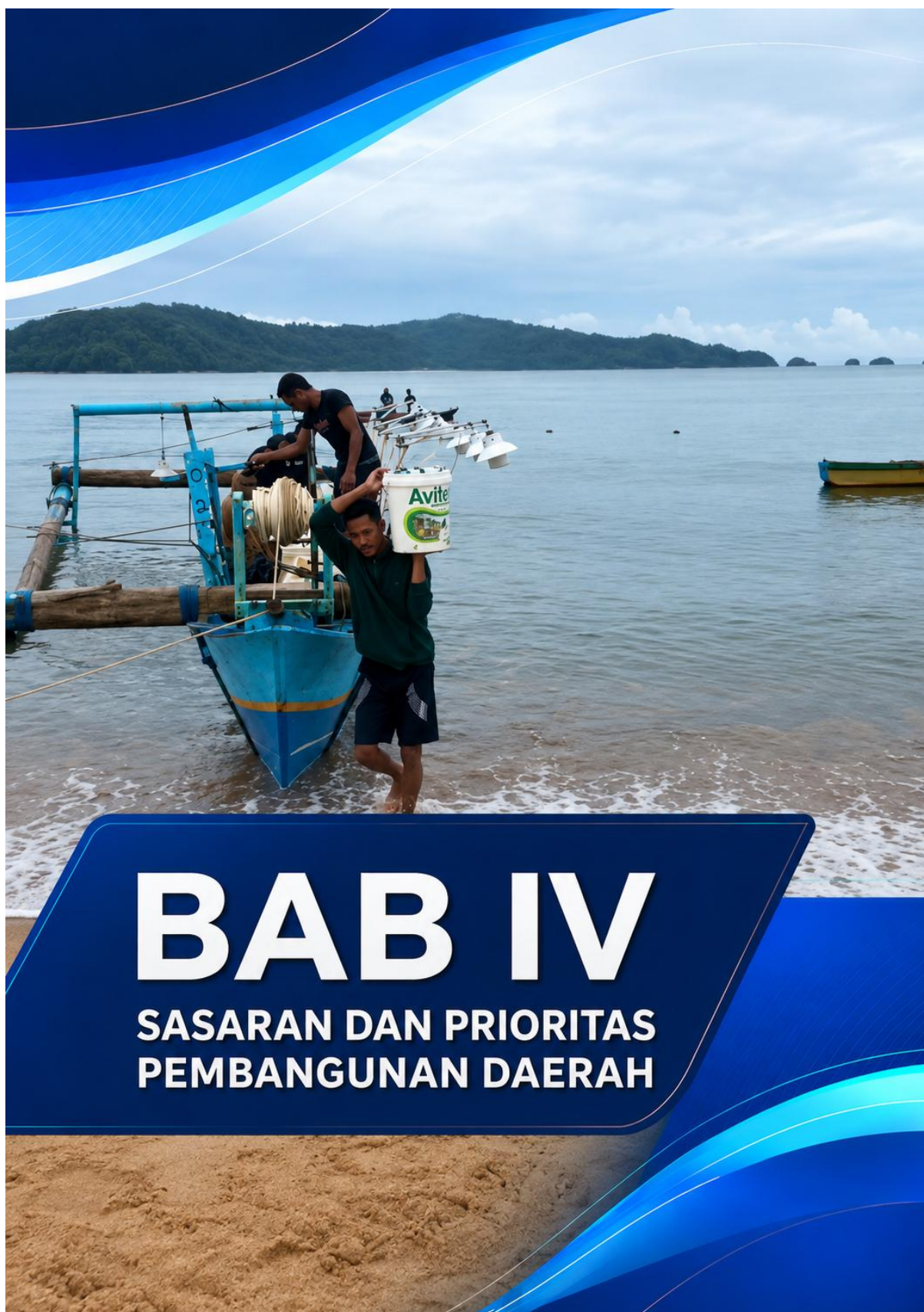
Pemerintah daerah perlu memastikan nilai SiLPA melalui hasil audit, merekonsiliasi pencatatannya, menjaga likuiditas, serta menghindari pengeluaran pembiayaan yang tidak mendesak. Melalui kebijakan yang berhati-hati, pembiayaan daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan APBD, menjamin keberlanjutan pelayanan, dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu tanpa menimbulkan risiko fiskal pada tahun berikutnya.

Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Rek.	Uraian Pembiayaan	Target RKPD 2026 (Rp)	Perubahan RKPD 2026 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.855.000.000	14.855.000.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	14.855.000.000	14.855.000.000	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0

6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	14.855.000.000	14.855.000.000	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0

Sumber: Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, BPKAD, diolah.



BAB IV

**SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 merupakan penajaman terhadap arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua RPJMD tetap konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah, sekaligus responsif terhadap perubahan kondisi serta kebutuhan pembangunan daerah.

Penetapan sasaran dan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan realisasi keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut digunakan untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, mengetahui program yang mengalami keterlambatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penanganan pada Semester II. Dengan pendekatan tersebut, perubahan sasaran dan prioritas tidak hanya didasarkan pada penyesuaian administratif, tetapi merupakan bagian dari proses pengendalian pembangunan berbasis kinerja.

Selain memperhatikan hasil evaluasi, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro, kemampuan keuangan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kebutuhan pelayanan dasar, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta risiko lingkungan dan bencana. Kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan turut menjadi pertimbangan utama karena memengaruhi biaya pembangunan, konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pelayanan publik antarwilayah.

Sasaran pembangunan daerah menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan sampai dengan akhir Tahun 2026 dan dinilai melalui indikator yang terukur. Sasaran tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan program, kegiatan, lokasi, kelompok penerima manfaat, serta alokasi anggaran. Setiap sasaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan didukung oleh perangkat daerah yang memiliki tugas serta kewenangan sesuai urusan pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda utama yang memperoleh perhatian lebih besar karena memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Penentuan prioritas dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, jumlah masyarakat terdampak, besarnya kesenjangan pelayanan, daya ungkit terhadap perekonomian dan kesejahteraan, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan pendanaan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan tidak sekadar mencerminkan banyaknya program, tetapi menunjukkan fokus intervensi yang harus diselesaikan atau dipercepat.

Pada Tahun 2026, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan. Kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan, konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya memadai, akses terhadap infrastruktur dasar masih belum merata, serta produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal. Pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, kesempatan kerja, ketahanan pangan, kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, pengelolaan lingkungan hidup, dan ketangguhan terhadap bencana.

Berbagai permasalahan tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterbatasan konektivitas, misalnya, tidak hanya menjadi permasalahan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi akses pendidikan dan kesehatan, biaya logistik, harga kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, dan daya tarik investasi. Demikian pula, rendahnya kualitas sumber daya

manusia akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, kemampuan mengembangkan usaha, dan daya saing daerah.

Oleh karena itu, arah pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan konektivitas kepulauan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengembangan sektor unggulan, penanggulangan kemiskinan, perlindungan lingkungan hidup, serta transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target, penyempurnaan program, percepatan kegiatan, dan penataan kembali alokasi anggaran.

Penyesuaian prioritas juga dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Keterbatasan sumber pendapatan menuntut pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih selektif dan berorientasi pada hasil. Program yang memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan dasar dan pencapaian indikator utama perlu dipertahankan dan diperkuat. Sebaliknya, kegiatan yang berdaya ungkit rendah, tidak mendukung sasaran, mengalami kendala pelaksanaan, atau tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun perlu disesuaikan.

Hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 juga menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap setiap program. Program yang telah mencapai atau melampaui target perlu dievaluasi kembali agar targetnya tetap relevan dan menantang. Program dengan capaian rendah perlu dianalisis berdasarkan penyebabnya, baik yang berasal dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, ketersediaan sumber daya manusia, koordinasi, data, maupun kondisi geografis. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menetapkan langkah percepatan atau perubahan kebijakan.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 juga harus menjamin keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Prioritas daerah disusun untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan permasalahan lokal. Keselarasan tersebut diperlukan untuk memperkuat sinergi program, menghindari duplikasi, dan meningkatkan peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat serta pemerintah provinsi.

Pelaksanaan prioritas pembangunan memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap realisasi kegiatan, tetapi juga terhadap pencapaian indikator sasaran. Pemerintah kecamatan dan desa berperan dalam memastikan ketepatan lokasi serta penerima manfaat. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengembangan ekonomi, inovasi, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Pengendalian pelaksanaan sasaran dan prioritas dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap kemajuan fisik, realisasi keuangan, keluaran, dan hasil program. Data capaian harus diverifikasi dan direkonsiliasi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila terdapat deviasi yang signifikan, perangkat daerah perlu segera menyusun rencana tindak lanjut dan melakukan perbaikan tanpa menunggu akhir tahun.

Dengan demikian, Bab IV ini memuat sasaran pembangunan daerah Tahun 2026, keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta fokus intervensi yang perlu dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Keseluruhan rumusan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026.

Melalui penetapan sasaran dan prioritas yang terukur, realistis, dan berbasis hasil evaluasi, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan tetap berjalan sesuai arah pembangunan jangka menengah. Pelaksanaan prioritas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, menurunkan kemiskinan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan pembangunan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, serta pengalokasian anggaran.

Untuk periode 2025–2029, tujuan dan sasaran pembangunan nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut merupakan penjabaran tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045 sekaligus penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden. RPJMN wajib menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025–2029

Visi pembangunan nasional Tahun 2025–2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan masyarakat. Kata “bersama” menunjukkan pentingnya kolaborasi, sedangkan “Indonesia Maju” menggambarkan kondisi negara yang mandiri, produktif, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi meliputi peningkatan kualitas manusia, penguatan ekonomi, pemerataan pembangunan, reformasi tata kelola, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan nasional.

Tujuan Pembangunan Nasional

Secara umum, pembangunan nasional Tahun 2025–2029 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan nasional.

Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari peningkatan PDB, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki pendapatan riil masyarakat.

Kebijakan ekonomi diarahkan pada penguatan sektor produktif, industrialisasi, hilirisasi, investasi, UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Daerah didorong mengembangkan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayahnya.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, tujuan tersebut relevan dengan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, pariwisata bahari, UMKM, dan perdagangan.

Peningkatan produksi perlu diikuti pengolahan dan pemasaran agar nilai tambah dapat dinikmati masyarakat lokal.

2) Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan

Pembangunan nasional bertujuan menurunkan kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta memperkecil kesenjangan antarwilayah. Penanganannya dilakukan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penciptaan pekerjaan, peningkatan pelayanan dasar, serta pembangunan desa dan wilayah tertinggal.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas produktif rumah tangga. Masyarakat miskin dan rentan perlu memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan jaminan sosial.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, kebijakan ini perlu dilaksanakan melalui konvergensi program pada keluarga dan wilayah prioritas. Karakteristik kepulauan menyebabkan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi juga oleh keterisolasian dan tingginya biaya memperoleh pelayanan dasar.

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, terampil, berkarakter, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas manusia dilakukan sejak masa kehamilan, usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, hingga usia produktif.

Intervensi utama meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, penguatan literasi dan numerasi, pelayanan kesehatan primer, penurunan kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Kabupaten Pulau Taliabu perlu menerjemahkan tujuan ini melalui pemerataan guru dan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas serta RSUD Bobong, peningkatan mutu pembelajaran, pencegahan putus sekolah, perbaikan sistem rujukan, dan konvergensi penanganan stunting.

4) Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Pembangunan nasional bertujuan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lapangan kerja yang dihasilkan diharapkan memiliki produktivitas, pendapatan, perlindungan, dan keberlanjutan yang lebih baik.

Kebijakan mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pengembangan kewirausahaan, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan investasi, serta perlindungan pekerja formal dan informal.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, penciptaan pekerjaan perlu dihubungkan dengan sektor unggulan. Pelatihan tenaga kerja harus sesuai kebutuhan pertanian modern, perikanan, pengolahan hasil, konstruksi, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital.

5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, industrialisasi, hilirisasi, dan transformasi digital. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harus meningkatkan pengolahan dan nilai tambah di dalam negeri.

Kebijakan tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur, konektivitas, logistik, energi, telekomunikasi, pembiayaan, dan kemudahan berusaha. Produktivitas sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri, dan jasa perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi Pulau Taliabu, peningkatan daya saing memerlukan perbaikan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, rantai dingin, fasilitas pengolahan, dan akses pasar. Hilirisasi komoditas lokal menjadi strategi utama untuk meningkatkan PDRB dan pendapatan masyarakat.

6) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Antarwilayah

Pembangunan nasional bertujuan mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan timur, perkotaan dan perdesaan, pusat pertumbuhan dan wilayah tertinggal, serta wilayah daratan dan kepulauan. Pemerataan dilakukan melalui pembangunan dari desa dan dari bawah.

Pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, pusat pertumbuhan baru, ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pendekatan pembangunan disesuaikan dengan karakteristik geografis dan potensi masing-masing wilayah.

Tujuan tersebut sangat relevan bagi Kabupaten Pulau Taliabu. Pemerataan pembangunan perlu mempertimbangkan jarak antarkecamatan dan desa, keterbatasan transportasi laut, kondisi jalan, akses telekomunikasi, serta distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan.

7) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan dan pembangunan.

Kebijakan mencakup transformasi digital pemerintahan, integrasi layanan, penyederhanaan proses, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat SPBE, Satu Data Indonesia, integrasi perencanaan dan penganggaran, pengukuran kinerja, pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan pengelolaan keuangan daerah.

8) Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung, risiko bencana, perubahan iklim, dan kebutuhan generasi mendatang.

Kebijakan mencakup ekonomi hijau, ekonomi biru, energi bersih, perlindungan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Bagi Pulau Taliabu, pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan perlindungan laut, mangrove, pesisir, hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan rawan bencana. Pengembangan pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata harus memenuhi prinsip keberlanjutan.

Asta Cita sebagai Prioritas Nasional

Visi pembangunan nasional dijabarkan melalui delapan misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Asta Cita menjadi delapan Prioritas Nasional.

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Sasarannya mencakup meningkatnya kualitas kelembagaan demokrasi, kebebasan sipil yang bertanggung jawab, partisipasi politik, penghormatan HAM, ketahanan sosial, dan persatuan nasional.

Implikasinya bagi Kabupaten Pulau Taliabu meliputi penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, forum kerukunan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta perlindungan kelompok rentan.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa

Prioritas ini mencakup penguatan pertahanan dan keamanan sekaligus kemandirian dalam pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sasarannya adalah meningkatnya ketahanan nasional, ketersediaan pangan, ketahanan energi dan air, keamanan wilayah, serta berkembangnya sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Bagi Pulau Taliabu, dukungannya diwujudkan melalui peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan perikanan dan ekonomi biru, perlindungan pesisir, penguatan ketahanan bencana, serta peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah.

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur, penciptaan pekerjaan, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan peningkatan produktivitas.

Sasarannya mencakup meningkatnya konektivitas, ketersediaan infrastruktur dasar, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, jumlah wirausaha, investasi, serta daya saing industri dan UMKM.

Bagi Pulau Taliabu, pelaksanaannya meliputi pembangunan jalan dan pelabuhan, telekomunikasi, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas produksi, pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan kemudahan investasi.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, dan Kesehatan

Prioritas ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Cakupannya meliputi pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan dan pemuda, serta perlindungan penyandang disabilitas.

Sasarannya adalah meningkatnya derajat kesehatan, mutu pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, partisipasi perempuan, kapasitas pemuda, prestasi olahraga, dan inklusivitas pelayanan.

Kabupaten Pulau Taliabu perlu mendukungnya melalui peningkatan literasi dan numerasi, pemerataan guru, penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan, pencegahan stunting, pemberdayaan perempuan, dan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Prioritas ini bertujuan meningkatkan pengolahan sumber daya alam dan komoditas unggulan di dalam negeri. Hilirisasi diharapkan meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, ekspor, dan penerimaan negara serta daerah.

Sasarannya mencakup meningkatnya kontribusi industri pengolahan, produktivitas, investasi, ekspor produk olahan, penggunaan teknologi, dan keterkaitan industri dengan usaha lokal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, hilirisasi dapat diterapkan pada kelapa, pala, cengkeh, hasil perikanan, tanaman pangan, dan komoditas lokal lainnya. Pemerintah daerah perlu mendukung rumah produksi, peralatan, standardisasi, perizinan, kemasan, rantai dingin, dan pemasaran.

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas ini menempatkan desa sebagai pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

Sasarannya mencakup meningkatnya kualitas pelayanan desa, kapasitas pemerintahan desa, ekonomi perdesaan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan kemandirian masyarakat.

Bagi Pulau Taliabu, prioritas ini diterjemahkan melalui pembangunan berbasis desa, penguatan BUMDes, peningkatan pelayanan dasar, ketahanan pangan, konektivitas desa, pemberdayaan masyarakat, serta penggunaan data kemiskinan yang akurat.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pencegahan Korupsi dan Narkoba

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, birokrasi yang efektif, pemberantasan korupsi, pelayanan publik yang berkualitas, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sasarannya mencakup meningkatnya kualitas regulasi, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan ketahanan masyarakat terhadap narkoba.

Kabupaten Pulau Taliabu perlu mendukungnya melalui penguatan SPIP, tindak lanjut hasil pemeriksaan, digitalisasi layanan, transparansi anggaran, pengadaan yang akuntabel, serta pencegahan korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya

Prioritas ini diarahkan untuk membangun masyarakat yang harmonis, berbudaya, toleran, dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan penguatan nilai sosial budaya.

Sasarannya mencakup meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana, pelestarian budaya, toleransi, kerukunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagi Pulau Taliabu, dukungannya dilakukan melalui perlindungan mangrove dan pesisir, pengelolaan sampah, mitigasi banjir dan abrasi, pelestarian budaya lokal, penguatan kerukunan, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sasaran Utama Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025–2029 menggambarkan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional. Sasaran tersebut mencakup dimensi ekonomi, sosial, tata kelola, kewilayahan, lingkungan hidup, serta ketahanan nasional.

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan secara bertahap melalui investasi, industrialisasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, perdagangan, dan pengembangan sektor baru. Pertumbuhan harus bersifat inklusif, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah tidak hanya diminta mengejar pertumbuhan PDRB, tetapi juga memastikan pertumbuhan menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan.

2. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran kemajuan menuju negara berpendapatan tinggi. Peningkatannya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, struktur ekonomi, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Daerah perlu meningkatkan PDRB per kapita melalui penciptaan nilai tambah, hilirisasi, kesempatan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

3. Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sasaran nasional mencakup penurunan kemiskinan secara signifikan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pendekatannya memadukan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah daerah harus menggunakan data sosial ekonomi yang mutakhir, memastikan ketepatan sasaran bantuan, dan mengintegrasikan program lintas sektor.

4. Pengurangan Ketimpangan

Pengurangan ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Pembangunan wilayah diarahkan untuk memperkuat pusat pertumbuhan di luar kawasan yang telah maju.

Bagi daerah kepulauan, pemerataan membutuhkan kebijakan khusus terhadap wilayah terpencil dan berbiaya tinggi.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran sumber daya manusia mencakup peningkatan kesehatan, pendidikan, keterampilan, produktivitas, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan inklusivitas. Keberhasilannya diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, gizi, ketenagakerjaan, dan pembangunan manusia.

6. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas

Sasaran ketenagakerjaan adalah menurunkan pengangguran, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, memperluas pekerjaan formal, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.

Daerah perlu menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan investasi dan sektor unggulan.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran lingkungan mencakup peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan; pengurangan emisi; pengelolaan sampah; perlindungan keanekaragaman hayati; serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

8. Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Sasarannya adalah pemerintahan yang efektif, akuntabel, digital, transparan, dan mampu memberikan pelayanan berkualitas. Indikatornya antara lain reformasi birokrasi, SPBE, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan pengendalian korupsi.

Prinsip Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan nasional menggunakan beberapa prinsip utama.

Pertama, pembangunan berorientasi pada hasil. Keberhasilan tidak hanya diukur dari anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari perubahan kondisi masyarakat.

Kedua, pembangunan dilaksanakan secara inklusif. Kelompok miskin, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan wilayah tertinggal harus memperoleh manfaat.

Ketiga, pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana.

Keempat, pembangunan dilaksanakan secara terpadu. Program antar-kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu disinergikan.

Kelima, pembangunan menggunakan pendekatan kewilayahan. Kebijakan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan setiap daerah.

Keenam, pembangunan didukung data yang akurat. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi harus menggunakan indikator serta sumber data yang jelas.

Keterkaitan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 harus menjaga keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Keselarasan diperlukan agar program daerah mendukung pencapaian sasaran nasional sekaligus memperoleh peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Dukungan Kabupaten Pulau Taliabu terhadap tujuan dan sasaran nasional dapat diwujudkan melalui:

1. peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. penurunan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan;
3. pengembangan pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan;
4. pengembangan perikanan dan ekonomi biru;
5. hilirisasi komoditas serta penguatan UMKM;
6. peningkatan konektivitas jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi;
7. pembangunan air minum, sanitasi, dan perumahan layak;
8. peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan;
9. penguatan tata kelola dan digitalisasi pelayanan;
10. perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; serta
11. penguatan kerukunan, kebudayaan, dan ketahanan sosial.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, keterkaitan tersebut perlu ditunjukkan pada tingkat prioritas, program, kegiatan, indikator, lokasi, perangkat daerah, dan sumber pendanaan. Program yang mendukung Prioritas Nasional perlu diberi penandaan agar kontribusi daerah dapat diukur secara jelas.

Tabel 4.1 Prioritas Nasional dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

No.	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Baseline 2024 (%)	Target 2026 (%)
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Meningkatnya kualitas demokrasi, partisipasi masyarakat, penghormatan HAM, toleransi, kerukunan, dan ketahanan sosial. Indikator representatif menggunakan capaian kualitas demokrasi dalam skala 0–100.	79,51	80,50

2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya kemandirian pangan, energi, dan air; berkembangnya ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru. Indikator representatif menggunakan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan—semakin rendah semakin baik.	8,27	6,50–7,50
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif	Meningkatnya konektivitas, infrastruktur dasar, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, kewirausahaan, investasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Indikator representatif menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka—semakin rendah semakin baik.	4,91	4,44–4,96
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan, gizi, keterampilan, kesetaraan gender, partisipasi pemuda, dan pelayanan yang inklusif. Indikator representatif menggunakan prevalensi stunting—semakin rendah semakin baik.	19,80	17,80
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan, hilirisasi komoditas, investasi, produktivitas, penggunaan teknologi, ekspor produk olahan, dan penyerapan tenaga kerja. Indikator representatif menggunakan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB.	18,98	20,00
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan; meningkatnya kemandirian desa, pelayanan dasar, ekonomi perdesaan, dan perlindungan sosial. Indikator representatif menggunakan tingkat kemiskinan—semakin rendah semakin baik.	8,57	6,50–7,50
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Meningkatnya reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, pemerintahan digital, akuntabilitas, kepastian hukum, pencegahan korupsi, dan pencegahan narkoba. Indikator representatif menggunakan capaian kematangan SPBE yang dikonversi ke skala persentase.	62,40	70,00
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan iklim, pengelolaan sampah, pengurangan risiko bencana,	73,53	75,00

lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama	pelestarian budaya, kerukunan, dan toleransi. Indikator representatif menggunakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dikonversi ke skala persentase.		
--	---	--	--

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029 dan Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026. RPJMN 2025–2029 menggunakan Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional.

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk memperkuat tabel tersebut, sasaran makro pembangunan nasional dapat disajikan secara terpisah. Sasaran makro merupakan ukuran lintas prioritas sehingga tidak tepat ditempatkan hanya pada satu Prioritas Nasional.

Tabel 4.2 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2026

No.	Sasaran Makro	Baseline 2024 (%)	Target 2026 (%)
1	Pertumbuhan ekonomi	5,03%	Kisaran 5,2–5,8%
2	Tingkat kemiskinan	8,57%	Kisaran 6,5–7,5%
3	Tingkat kemiskinan ekstrem	Menuju kurang dari 1%	0%
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,91%	Kisaran 4,44–4,96%
5	Rasio Gini	0,381	Kisaran 0,377–0,380
6	Indeks Modal Manusia	Menggunakan capaian 2024	Meningkat dibandingkan baseline
7	Indeks Pembangunan Manusia	Menggunakan capaian 2024	Meningkat dibandingkan baseline
8	Nilai Tukar Petani	Menggunakan capaian 2024	Meningkat dan tetap di atas 100
9	Nilai Tukar Nelayan	Menggunakan capaian 2024	Meningkat dan tetap di atas 100
10	Penurunan emisi gas rumah kaca	Menggunakan capaian penurunan emisi 2024	Meningkat sesuai lintasan target NDC

Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2026 Berdasarkan Lokasi Prioritas dan *Highlight* Intervensi

Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2026 mencakup Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Arah pembangunan wilayah difokuskan pada penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, pemenuhan pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan daerah afirmasi. Pendekatan tersebut diperlukan

karena karakteristik Wilayah Maluku berupa kepulauan menyebabkan tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas, ketimpangan akses pelayanan dasar, serta belum meratanya pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Penyajian pembangunan wilayah tidak hanya didasarkan pada batas administrasi, tetapi diarahkan pada lokasi yang mempunyai nilai strategis sebagai kawasan pertumbuhan, kawasan produksi, pusat pelayanan, daerah kepulauan, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan. Dengan pendekatan tersebut, intervensi pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

Tabel 4.3 Lokasi Prioritas dan *Highlight* Intervensi Pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2026

No.	Lokasi Prioritas	Wilayah/Lokus Utama	<i>Highlight</i> Intervensi Tahun 2026
1	Kawasan perkotaan dan pusat pelayanan regional	Ambon, Ternate, Sofifi, Tual, Masohi dan pusat perkotaan lainnya	Peningkatan pelayanan perkotaan; penyediaan air minum dan sanitasi; pengelolaan persampahan; pengendalian banjir; peningkatan kualitas permukiman; transportasi perkotaan; serta penguatan pelayanan pemerintahan berbasis digital.
2	Kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam	Weda, Pulau Obi, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur	Penguatan industri pengolahan dan hilirisasi mineral; pengembangan infrastruktur kawasan industri; penyediaan energi; peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengendalian dampak lingkungan; dan peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok industri.
3	Kawasan pertumbuhan berbasis pariwisata	Banda Neira, Morotai, Kepulauan Kei, Ternate–Tidore dan destinasi bahari lainnya	Pengembangan daya tarik wisata bahari dan budaya; peningkatan aksesibilitas destinasi; pembangunan amenitas; peningkatan kualitas SDM pariwisata; promosi destinasi; penyelenggaraan kegiatan wisata; serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM pendukung pariwisata.
4	Kawasan ekonomi biru dan perikanan	Ambon, Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu	Penguatan sentra produksi perikanan; pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan; penyediaan rantai dingin; pengembangan budidaya perikanan; peningkatan pengolahan hasil laut; perlindungan nelayan; dan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal.
5	Kawasan produksi pertanian dan perkebunan	Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera, Buru, Seram dan wilayah produksi lainnya	Peningkatan produksi tanaman pangan; pengembangan kelapa, pala, cengkih, kakao dan komoditas unggulan; penyediaan benih dan sarana produksi; rehabilitasi jaringan irigasi; pembangunan jalan usaha tani; penguatan penyuluhan; serta pengembangan pengolahan hasil pertanian.
6	Kawasan swasembada pangan	Pulau Taliabu, Kepulauan Sula,	Perluasan dan intensifikasi lahan pangan; peningkatan produktivitas padi, jagung,

		Halmahera, Buru dan Seram	umbi-umbian dan pangan lokal; perlindungan lahan pertanian; penyediaan alat dan mesin pertanian; penguatan cadangan pangan; serta pengembangan distribusi pangan antarpulau.
7	Kawasan konektivitas antarpulau	Pelabuhan regional, pelabuhan pengumpan, rute penyeberangan dan jalur perintis di Maluku dan Maluku Utara	Pengembangan pelabuhan; peningkatan keselamatan pelayaran; penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan perintis; peningkatan akses menuju pelabuhan; penataan jaringan logistik antarpulau; serta peningkatan keterhubungan kawasan produksi dengan pasar.
8	Kawasan layanan transportasi udara	Bandara di Ambon, Ternate, Morotai, Tual, Saumlaki, Namlea, Pulau Taliabu dan wilayah kepulauan lainnya	Peningkatan fasilitas dan keselamatan bandar udara; optimalisasi penerbangan perintis; pengembangan konektivitas antarpulau; peningkatan pelayanan penumpang dan barang; serta integrasi transportasi udara dengan pelabuhan dan pusat kegiatan ekonomi.
9	Kawasan afirmasi kepulauan dan daerah tertinggal	Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan pulau-pulau kecil	Percepatan penyediaan infrastruktur dasar; pembangunan jalan dan jembatan; peningkatan air minum dan sanitasi; penyediaan perumahan layak; peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan; penguatan ekonomi desa; serta peningkatan perlindungan sosial.
10	Kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar	Morotai, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan pulau-pulau kecil terluar	Penguatan pusat pelayanan kawasan perbatasan; peningkatan sarana pertahanan dan keamanan; penyediaan infrastruktur dasar; pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan; peningkatan konektivitas; dan penguatan pengawasan sumber daya kelautan.
11	Kawasan pelayanan pendidikan dan pengembangan SDM	Seluruh kabupaten/kota, terutama daerah kepulauan dan daerah tertinggal	Revitalisasi fasilitas pendidikan; peningkatan akses pendidikan menengah; penguatan pendidikan vokasi; pemberian bantuan pendidikan afirmasi; peningkatan kapasitas guru; penyediaan pembelajaran digital; serta penyesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan pertanian, perikanan, pariwisata dan industri.
12	Kawasan pelayanan kesehatan	Seluruh kabupaten/kota, dengan prioritas daerah kepulauan dan 3T	Peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas; pemerataan tenaga kesehatan; penyediaan obat dan alat kesehatan; penguatan pelayanan kesehatan bergerak; penurunan kematian ibu dan bayi; percepatan penurunan stunting; pengendalian malaria dan tuberkulosis; serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan.

13	Kawasan ketenagalistrikan dan energi	Pulau-pulau belum berlistrik dan pusat kegiatan ekonomi di Maluku dan Maluku Utara	Pengembangan pembangkit listrik; pembangunan jaringan transmisi dan distribusi; pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga belum berlistrik; pengembangan energi baru terbarukan; serta peningkatan keandalan pasokan energi pada pusat produksi dan pelayanan publik.
14	Kawasan telekomunikasi dan transformasi digital	Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan wilayah dengan akses internet terbatas	Perluasan jaringan telekomunikasi; penyediaan akses internet cepat; pengurangan wilayah tanpa sinyal; digitalisasi pelayanan pemerintahan; pengembangan layanan penyiaran digital; serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM.
15	Kawasan rawan bencana dan perubahan iklim	Ambon, Ternate, pesisir Halmahera, Seram, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya dan pulau-pulau kecil	Penguatan mitigasi gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, abrasi dan cuaca ekstrem; penyediaan sistem peringatan dini; pembangunan infrastruktur tahan bencana; rehabilitasi pesisir; peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
16	Kawasan konservasi dan perlindungan lingkungan	Laut Banda, Laut Arafura, perairan Halmahera, Morotai, Seram dan kawasan pesisir lainnya	Pengelolaan kawasan konservasi perairan; rehabilitasi mangrove dan terumbu karang; pengendalian pencemaran laut; pengurangan sampah laut; pemulihan lahan pascatambang; pengawasan pemanfaatan ruang laut; dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis konservasi.
17	Kawasan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa	Desa-desa prioritas di Pulau Taliabu dan kabupaten kepulauan lainnya	Pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial ekonomi; perlindungan sosial adaptif; pemberdayaan keluarga miskin; peningkatan keterampilan kerja; pengembangan koperasi dan UMKM; penyediaan sarana ekonomi desa; serta penguatan ketahanan pangan rumah tangga.
18	Kawasan penguatan tata kelola pemerintahan	Seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; integrasi data pembangunan; peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; penguatan pelayanan publik; peningkatan kapasitas fiskal daerah; optimalisasi pendapatan asli daerah; dan penguatan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

Penekanan Lokasi Prioritas Kabupaten Pulau Taliabu

Dalam kerangka pembangunan Wilayah Maluku Tahun 2026, Kabupaten Pulau Taliabu perlu ditempatkan sebagai kawasan afirmasi kepulauan sekaligus kawasan produksi berbasis sumber daya lokal. Posisi tersebut didasarkan pada karakteristik geografis daerah yang terdiri atas pulau-pulau, terbatasnya konektivitas antarkecamatan dan antarpulau, tingginya biaya distribusi, belum meratanya pelayanan dasar, serta besarnya potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Highlight intervensi yang relevan bagi Kabupaten Pulau Taliabu meliputi:

1. peningkatan konektivitas jalan yang menghubungkan pusat pemerintahan, sentra produksi, pelabuhan, bandar udara, fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. peningkatan fasilitas pelabuhan dan penyelenggaraan angkutan laut serta penyeberangan perintis;
3. optimalisasi pelayanan Bandar Udara Dufo dan penguatan penerbangan perintis;
4. pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha tani dan jalan produksi;
5. peningkatan produksi dan hilirisasi kelapa, pala, cengkih, kakao, tanaman pangan dan hasil perkebunan lainnya;
6. pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, fasilitas pendaratan ikan, penyimpanan berpendingin, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
7. penyediaan listrik bagi rumah tangga dan sentra produksi yang belum terlayani secara memadai;
8. perluasan jaringan telekomunikasi dan internet cepat pada desa-desa yang masih mengalami keterbatasan sinyal;
9. peningkatan akses air minum, sanitasi, perumahan layak dan pengelolaan persampahan;
10. peningkatan kualitas puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak dan sistem rujukan antarpulau;
11. revitalisasi fasilitas pendidikan, pemerataan guru, penguatan pendidikan vokasi dan penyediaan pembelajaran digital;
12. percepatan penurunan kemiskinan, stunting, pengangguran dan kesenjangan pelayanan antarwilayah;
13. pengembangan koperasi desa, UMKM, BUM Desa dan rantai nilai komoditas unggulan;
14. peningkatan ketahanan daerah terhadap gempa bumi, tsunami, abrasi, gelombang tinggi, banjir dan cuaca ekstrem; serta
15. penguatan kapasitas pemerintahan, perencanaan berbasis data, digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu diarahkan pada keterpaduan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi produktif, pemerataan pelayanan dasar, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi keterisolasian wilayah, menurunkan biaya logistik, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029.

Sumber utama: [Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026](#), khususnya Lampiran IV mengenai Arah Pembangunan Kewilayahan. Tabel di atas merupakan

penyajian kembali secara sistematis dan kontekstual untuk kebutuhan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029. Tujuan menggambarkan kondisi akhir yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan jangka menengah, sedangkan sasaran menunjukkan hasil pembangunan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi melalui indikator kinerja daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 adalah **“Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Bersama Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahterah, Berkeadilan dan Berkelanjutan.”** Visi tersebut diarahkan untuk membangun Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang maju dan berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan stabilitas daerah, serta perlindungan lingkungan hidup.

Dalam kerangka jangka panjang, pembangunan periode 2025–2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2045 dengan tema **“Perkuatan Fondasi Transformasi Maluku Utara Marimoi.”** Tahapan tersebut menjadi landasan awal transformasi Maluku Utara sebagai pusat industrialisasi berbasis sumber daya perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Meskipun demikian, proses industrialisasi diarahkan agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan pemerataan pendapatan, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterlibatan pelaku ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan [RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029](#), tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul, dan Berdaya Saing

Tujuan pertama diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia Maluku Utara yang sehat, berpendidikan, produktif, adaptif, dan mampu bersaing. Peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat utama transformasi ekonomi karena pertumbuhan industri, pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi digital memerlukan tenaga kerja yang sehat, terampil, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Modal Manusia yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **0,487 poin**. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran **3,00–4,50 persen**. Penurunan kemiskinan tidak hanya ditempuh melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi:

a. Terwujudnya kesehatan untuk semua

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta penanganan masalah kesehatan ibu dan anak, stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pada tahun 2026, Usia Harapan Hidup ditargetkan mencapai **71,79 tahun**, sedangkan prevalensi stunting pada balita ditargetkan turun menjadi **21,58 persen**.

Pencapaian sasaran ini membutuhkan penguatan puskesmas dan rumah sakit, sistem rujukan antarpulau, pelayanan kesehatan bergerak, pemenuhan dokter dan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan kelompok

rentan. Pendekatan pelayanan kesehatan harus memperhatikan karakteristik kepulauan agar keterbatasan geografis tidak menjadi penghambat pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

b. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah, serta mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah. Pada tahun 2026, Harapan Lama Sekolah ditargetkan berada pada kisaran **14,08–14,09 tahun**, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan mencapai **9,84–9,86 tahun**.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, pemerataan guru, penguatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan bantuan pendidikan afirmasi, pengembangan pembelajaran digital, serta penguatan pendidikan vokasi pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan teknologi.

c. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial diarahkan agar mampu menjangkau penduduk miskin, kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, serta masyarakat yang terdampak bencana dan gejolak ekonomi. Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **63 poin**.

Pencapaiannya memerlukan pemutakhiran data sosial ekonomi, integrasi basis data penerima manfaat, peningkatan ketepatan sasaran program, perluasan jaminan sosial, dan pengembangan perlindungan sosial adaptif yang mampu merespons perubahan harga, bencana alam, kehilangan pekerjaan, dan kerentanan sosial lainnya.

d. Terwujudnya masyarakat inklusif dan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Sasaran ini menekankan pentingnya pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh kelompok masyarakat. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **64,0 poin**. Kebijakan pembangunan diarahkan pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan.

2. Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Teknologi

Tujuan kedua diarahkan untuk membentuk struktur ekonomi Maluku Utara yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Transformasi ekonomi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri, perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penerapan teknologi dan inovasi.

Indikator utama tujuan ini adalah PDRB per kapita yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **Rp92,0 juta per orang**. Peningkatan PDRB per kapita diharapkan mencerminkan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan perhatian terhadap distribusi pendapatan, penyerapan tenaga kerja lokal dan keterkaitan kegiatan industri dengan perekonomian daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi meliputi:

a. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **12,46 persen**. Kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas pangan, perkebunan dan perikanan; penyediaan sarana produksi; penguatan penyuluhan; pembangunan

infrastruktur produksi; pengembangan industri pengolahan; serta perbaikan rantai distribusi dan pemasaran.

Sektor ini memiliki arti penting karena sebagian besar masyarakat kabupaten kepulauan, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, menggantungkan kehidupan pada pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, hilirisasi harus mampu meningkatkan nilai tambah di tingkat petani dan nelayan, bukan hanya meningkatkan volume produksi bahan mentah.

b. Meningkatkan ekonomi kreatif dan pariwisata

Sasaran ini diukur melalui rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **0,25 persen**. Pengembangan pariwisata diarahkan pada peningkatan aksesibilitas destinasi, penyediaan amenities, peningkatan kualitas SDM pariwisata, promosi, pengembangan ekonomi kreatif, dan keterlibatan UMKM lokal.

c. Terwujudnya daya saing industri, perdagangan, koperasi dan UMKM

Rasio PDRB industri dan perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **44,37 persen**. Pencapaian sasaran ini memerlukan penguatan hubungan antara industri besar dengan pelaku usaha lokal, peningkatan kualitas produk UMKM, penyediaan pembiayaan, digitalisasi pemasaran, pengembangan koperasi, serta peningkatan perlindungan dan kepastian usaha.

d. Terwujudnya kemandirian pangan

Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **62,5 poin**. Kebijakan diarahkan pada peningkatan produksi pangan lokal, perlindungan lahan pertanian, penguatan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi, stabilisasi harga, serta perbaikan distribusi pangan antarpulau. Kemandirian pangan sangat strategis karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat meningkatkan kerentanan Maluku Utara terhadap gangguan transportasi dan kenaikan harga.

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Adaptif

Tujuan ketiga diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi tata kelola dilakukan melalui penataan kelembagaan, penguatan sistem merit ASN, digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengawasan dan integritas aparatur.

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **59,95 poin**.

Sasaran pendukungnya meliputi:

- terwujudnya pelayanan publik berbasis digital, dengan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar **3,09** dan Indeks Pelayanan Publik sebesar **3,20 poin**;
- terwujudnya akuntabilitas pemerintahan, dengan target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar **64,24**; dan
- meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan, dengan target Indeks Integritas Nasional sebesar **60,96 poin**.

Pencapaian sasaran tersebut membutuhkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan manajemen kinerja, integrasi data pembangunan, penyederhanaan pelayanan, pengembangan kompetensi ASN, serta peningkatan pengawasan terhadap risiko penyimpangan.

4. Terwujudnya Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ekonomi

Tujuan keempat menempatkan stabilitas politik, keamanan dan ekonomi sebagai prasyarat berlangsungnya pembangunan. Kondisi daerah yang aman dan demokratis akan meningkatkan kepastian usaha, menjaga aktivitas ekonomi, memperkuat kehidupan sosial, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada tahun 2026, Indeks Demokrasi Provinsi ditargetkan mencapai **68,32 poin**. Sasaran meningkatnya kondusivitas daerah diukur melalui Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditargetkan sebesar **68,00 poin**. Sementara itu, sasaran meningkatnya daya saing investasi diukur melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto yang ditargetkan sebesar **47,00 persen**.

Kebijakan pada tujuan ini diarahkan pada pemeliharaan kerukunan masyarakat, penguatan pendidikan politik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban, mitigasi konflik sosial, pengendalian inflasi, pemberian kepastian berusaha, serta peningkatan kualitas dan pemerataan investasi.

5. Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal

Tujuan kelima diarahkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat, memperkuat kebudayaan daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta membangun ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga identitas sosial budaya dan keberlanjutan sumber daya alam.

Indeks Harmoni Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **66,00 poin**, sedangkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar **88,25 persen** sesuai ukuran yang digunakan dalam RPJMD.

Sasaran yang mendukung tujuan ini meliputi:

- meningkatnya pelestarian dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal, dengan target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar **57,06 poin**;
- meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar **80,53 poin**; dan
- meningkatnya ketahanan bencana, yang ditunjukkan melalui penurunan Indeks Risiko Bencana menjadi **139,00 poin**.

Penurunan Indeks Risiko Bencana menunjukkan perbaikan karena semakin rendah nilai indeks berarti semakin kecil tingkat risiko. Kebijakan diarahkan pada penguatan mitigasi gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, abrasi dan gelombang ekstrem; perlindungan kawasan pesisir; rehabilitasi ekosistem; pengendalian dampak pertambangan; serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

6. Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi dengan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan keenam diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui peningkatan konektivitas, penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan lokal, dan pemerataan infrastruktur dasar. Tujuan ini sangat relevan dengan karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan konektivitas laut, udara, jalan, listrik, telekomunikasi, air minum dan sanitasi.

Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **3,27 poin**. Sasaran pendukung tujuan ini terdiri atas:

- terwujudnya desa sebagai simpul pertumbuhan lokal, dengan target Indeks Desa sebesar **0,6553 poin**;

- meningkatnya konektivitas antarwilayah, dengan target Rasio Konektivitas sebesar **96,25 poin**; dan
- meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata, dengan target Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah sebesar **2,75 poin**.

Kebijakan pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan, pelabuhan dan bandar udara, transportasi perintis, jaringan listrik dan telekomunikasi, air minum, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pusat produksi dan pemasaran di tingkat desa. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara terpadu agar tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menurunkan biaya logistik dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Keterkaitan dengan Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu

Tujuan dan sasaran Provinsi Maluku Utara tersebut menjadi rujukan penting dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan dan program kabupaten mendukung pencapaian target provinsi sekaligus menjawab persoalan daerah secara lebih spesifik.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, keterkaitan paling kuat terdapat pada sasaran pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar, perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu memastikan bahwa program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada keluaran administratif dan fisik, tetapi secara terukur berkontribusi terhadap indikator sasaran pembangunan provinsi. Sinkronisasi tersebut harus diterjemahkan melalui kesesuaian indikator, target, lokasi prioritas, kelompok sasaran, program, kegiatan, subkegiatan dan dukungan pendanaan. Pendekatan ini akan memperkuat konsistensi pembangunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu serta meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

Sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 diarahkan pada percepatan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, pembangunan wilayah, serta penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Sasaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan agar pertumbuhan memberikan manfaat terhadap penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas manusia, dan pemerataan pelayanan dasar.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 12,10–13,80 persen dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,00–4,50 persen dan Rasio Gini antara 0,270–0,286. Kombinasi ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam perlu dihubungkan dengan pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sehingga menghasilkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan manusia, target Indeks Modal Manusia sebesar 0,487 didukung oleh peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi 71,79 tahun, penurunan prevalensi stunting menjadi 21,58 persen, peningkatan Harapan Lama Sekolah menjadi 14,08–14,09 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi 9,84–9,86 tahun. Target tersebut menegaskan pentingnya pemerataan pelayanan pendidikan

dan kesehatan, terutama pada kabupaten kepulauan dan wilayah dengan akses pelayanan dasar yang masih terbatas.

Pemerataan pembangunan wilayah diwujudkan melalui peningkatan Rasio Konektivitas menjadi 96,25 poin, Indeks Desa menjadi 0,6553 poin, serta Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah menjadi 2,75 poin. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, sasaran tersebut perlu diterjemahkan melalui pembangunan konektivitas jalan, pelabuhan dan transportasi perintis, perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi, peningkatan air minum dan sanitasi, serta penguatan desa sebagai pusat produksi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 4.4 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2026

No.	Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Kondisi/Target 2025	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	11,40	12,10–13,80
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,95–5,15	3,00–4,50
3	Rasio Gini	poin	0,280–0,297	0,270–0,286
4	Indeks Modal Manusia	poin	0,480	0,487
5	PDRB per Kapita	juta rupiah/orang	80,00	92,00
6	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,25	3,27
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	86,35	88,25

Target pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Rasio Gini juga tercantum dalam dokumen kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Target lainnya mengacu pada matriks kinerja RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029. [Pemerintah Provinsi Maluku Utara](#), [RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025–2029](#).

Tabel 4.5 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

No.	Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Kondisi/Target 2025	Target 2026
1	Terwujudnya SDM berkualitas, unggul, dan berdaya saing	Indeks Modal Manusia	poin	0,487
2	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	3,00–4,50
3	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	tahun	71,79
4	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Prevalensi Stunting pada Balita	%	21,58
5	Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,08–14,09

6	Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,84–9,86
7	Terwujudnya perlindungan sosial adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	poin	63,00
8	Terwujudnya masyarakat inklusif dan meningkatnya peran pemuda	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	poin	64,00
9	Terwujudnya kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi	PDRB per Kapita	juta rupiah/orang	92,00
10	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian dan perikanan	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	12,46
11	Meningkatnya ekonomi kreatif dan pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,25
12	Terwujudnya daya saing industri, perdagangan, dan KUKM	Rasio PDRB Industri dan Perdagangan	%	44,37
13	Terwujudnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	poin	62,50
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	59,95
15	Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	nilai	3,09
16	Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,20
17	Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP	nilai	64,24
18	Terwujudnya pemerintahan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	poin	60,96
19	Terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi	Indeks Demokrasi Provinsi	poin	68,32
20	Meningkatnya kondusivitas daerah	Indeks Ketenteraman,	poin	68,00

		Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
21	Meningkatnya daya saing investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	47,00
22	Terwujudnya ketahanan sosial budaya	Indeks Harmoni Indonesia	poin	66,00
23	Terwujudnya pembangunan rendah karbon	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	88,25
24	Meningkatnya pelestarian dan penerapan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	57,06
25	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	80,53
26	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	139,00
27	Terwujudnya pengembangan wilayah terintegrasi	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,27
28	Terwujudnya desa sebagai simpul pertumbuhan local	Indeks Desa	poin	0,6553
29	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Rasio Konektivitas	poin	96,25
30	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata	Pilar Infrastruktur dalam IDSD	poin	2,75

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Tujuan menggambarkan kondisi pembangunan yang hendak diwujudkan dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan hasil pembangunan yang lebih spesifik dan terukur. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator dan target kinerja sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara.”

Konsep **Mandiri** menegaskan upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi, sumber daya alam, keuangan, pangan, energi, dan pelayanan publik dengan mengurangi

ketergantungan berlebihan terhadap pihak luar. **Unggul** mengandung makna peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. **Damai** menggambarkan kondisi sosial yang aman, harmonis, toleran, berkeadilan, dan berlandaskan nilai budaya lokal. Sementara itu, **Adaptif** menunjukkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merespons perubahan teknologi, iklim, ekonomi, sosial, serta dinamika kebijakan nasional dan global.

Frasa “maju” dalam visi tersebut dimaknai sebagai percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, produktivitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Adapun frasa “di Provinsi Maluku Utara” menegaskan kedudukan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai bagian integral pembangunan regional yang harus diselenggarakan secara selaras dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara, RPJMN, dan RKP Tahun 2026.

Pencapaian visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi, tujuh tujuan utama, dan sejumlah sasaran pembangunan sebagai berikut.

1) **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing**

Tujuan pertama merupakan penjabaran Misi I, yaitu membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Tujuan ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **64,08 poin**, meningkat dari target tahun 2025 sebesar 63,48 poin.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan perbaikan secara simultan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, pencapaiannya tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dasar, air minum, sanitasi, perumahan, serta penguatan ekonomi keluarga.

Sasaran yang mendukung tujuan tersebut terdiri atas:

a) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan penduduk melalui pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, terjangkau, dan berkesinambungan. Usia Harapan Hidup pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **63,63 tahun**, meningkat dari 63,33 tahun pada 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan harapan terhadap membaiknya pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Angka Kematian Ibu pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **737 per 100.000 kelahiran hidup**, dari target 799 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025. Meskipun menunjukkan arah perbaikan, target tersebut masih menggambarkan tingginya risiko kematian maternal. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan dokter spesialis, belum optimalnya sistem rujukan, ketersediaan transportasi medis, keterlambatan pengambilan keputusan keluarga, serta keterbatasan sarana pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal perlu menjadi perhatian utama.

Kebijakan kesehatan tahun 2026 perlu diarahkan pada penguatan pelayanan antenatal sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas puskesmas dan rumah sakit, penyediaan rumah tunggu kelahiran, pemerataan bidan dan dokter, penguatan jejaring rujukan, penyediaan ambulans darat dan laut, serta penguatan sistem pemantauan ibu hamil berisiko tinggi. Upaya tersebut harus disertai percepatan penurunan stunting, peningkatan imunisasi, pengendalian malaria dan tuberkulosis, serta peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.

b) Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata

Sasaran pendidikan diarahkan untuk menjamin seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi kondisi geografis, ekonomi, sosial, maupun ketersediaan sarana pendidikan. Pada tahun 2026, rata-rata nilai Asesmen Nasional untuk literasi membaca ditargetkan mencapai **48,67 pada jenjang SD** dan **50,29 pada jenjang SMP**. Sementara itu, nilai numerasi ditargetkan mencapai **46,76 pada jenjang SD** dan **52,00 pada jenjang SMP**.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **12,90 tahun**, sedikit meningkat dibandingkan target 2025 sebesar 12,89 tahun. Target tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah diharapkan memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah. Namun, peningkatan angka partisipasi perlu diikuti dengan perbaikan mutu pembelajaran agar lama sekolah benar-benar menghasilkan kemampuan literasi, numerasi, karakter, kreativitas, dan keterampilan yang relevan.

Kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada rehabilitasi ruang kelas, pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, penyediaan perangkat pembelajaran digital, peningkatan akses internet sekolah, pemberian bantuan bagi peserta didik rentan, serta penguatan transisi dari SD ke SMP dan dari SMP ke pendidikan menengah. Pengembangan pendidikan vokasi juga perlu diselaraskan dengan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, teknologi informasi, dan kewirausahaan lokal.

2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Tujuan kedua merupakan penjabaran Misi II, yaitu membangun dan meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghasilkan pelayanan publik yang amanah, mengayomi, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan berada pada kategori **C**, sebelum meningkat menjadi kategori CC pada 2027–2028 dan kategori B pada akhir periode perencanaan.

Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan seluruh agenda pembangunan. Keterbatasan kapasitas fiskal, luasnya wilayah pelayanan, karakteristik kepulauan, keterbatasan aparatur teknis, serta meningkatnya tuntutan masyarakat memerlukan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berbasis teknologi.

Sasaran yang mendukung tujuan tersebut adalah:

a) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Sasaran ini diukur antara lain melalui Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **0,14 persen**, meningkat dari 0,12 persen pada 2025. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan perlunya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendataan objek dan subjek pajak, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan pelayanan perpajakan, dan pengawasan penerimaan daerah.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah maupun menghambat perkembangan UMKM. Penguatan pendapatan perlu diikuti peningkatan kualitas belanja, akuntabilitas pengadaan, pengelolaan aset, pengendalian program, dan evaluasi berbasis hasil.

b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **2,16**, meningkat dari 1,94 pada 2025. Pencapaian target tersebut membutuhkan pembangunan arsitektur SPBE, integrasi aplikasi, peningkatan kualitas jaringan komunikasi, penguatan

keamanan informasi, standardisasi data, digitalisasi layanan perizinan dan administrasi, serta peningkatan kompetensi digital aparaturnya.

Transformasi digital harus diarahkan untuk memperpendek waktu pelayanan, mengurangi biaya administrasi, memperluas jangkauan pelayanan hingga desa, meningkatkan transparansi, dan menyediakan data pembangunan yang akurat. Digitalisasi tidak cukup hanya melalui pembangunan aplikasi, tetapi harus disertai penyederhanaan proses bisnis dan integrasi sistem.

3) Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

Tujuan ketiga merupakan penjabaran Misi III tentang pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan. Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **62,55 poin**, meningkat dari 61,25 poin pada 2025.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu harus mempertimbangkan keterhubungan antarkecamatan, antardesa, sentra produksi, kawasan permukiman, pelabuhan, bandar udara, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pusat pemerintahan. Infrastruktur harus dipandang sebagai sistem yang saling terintegrasi, bukan sekadar kumpulan proyek fisik yang berdiri sendiri.

Sasaran pembangunan infrastruktur mencakup:

a) Meningkatkan kemudahan konektivitas antarwilayah

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **34,49 persen**, meningkat dari 32,99 persen pada 2025. Cakupan layanan telekomunikasi ditargetkan mencapai **77,46 persen**, meningkat dari 76,06 persen.

Peningkatan konektivitas diperlukan untuk menurunkan biaya angkutan, memperlancar distribusi pangan dan hasil produksi, memperluas jangkauan pelayanan dasar, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan akses menuju sentra produksi, pengembangan transportasi laut, peningkatan fasilitas pelabuhan, optimalisasi bandar udara, dan perluasan jaringan telekomunikasi.

b) Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **41,85 persen**. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum ditargetkan mencapai **88,05 persen**, sedangkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman ditargetkan sebesar **70,89 persen**.

Pemenuhan perumahan, air minum, dan sanitasi memiliki hubungan langsung dengan derajat kesehatan, penurunan stunting, produktivitas masyarakat, serta kualitas lingkungan permukiman. Oleh sebab itu, pembangunan perumahan perlu diintegrasikan dengan penyediaan air baku, sistem penyediaan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, listrik, akses jalan lingkungan, dan penataan kawasan permukiman.

4) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Tujuan keempat merupakan penjabaran Misi IV, yaitu membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat-pusat strategis ekonomi, penciptaan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan pengurangan hambatan distribusi barang dan jasa. Tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **6,63 persen**, dari target 6,89 persen pada 2025.

Penurunan kemiskinan harus ditempuh melalui kombinasi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial diperlukan untuk menjaga kemampuan konsumsi masyarakat miskin,

sedangkan pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Intervensi perlu diprioritaskan pada rumah tangga miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, petani kecil, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah dengan akses pelayanan dasar terbatas.

Sasaran yang mendukung tujuan tersebut meliputi:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah

Rasio PDRB industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **1,51 persen**, meningkat dari 1,40 persen pada 2025. Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum ditargetkan mencapai **0,09 persen**, meningkat dari 0,07 persen.

Target tersebut menunjukkan perlunya memperkuat hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil ekonomi lokal. Produk unggulan tidak cukup hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu diolah, dikemas, distandardisasi, dipromosikan, dan dihubungkan dengan pasar yang lebih luas. Pengembangan pariwisata juga perlu dikaitkan dengan kuliner, kerajinan, transportasi, akomodasi, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan desa wisata.

b) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia secara inklusif

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **48,74 persen**, meningkat dari 48,37 persen pada 2025. Peningkatan partisipasi perempuan perlu didukung melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pengembangan usaha rumahan, perlindungan pekerja, penyediaan layanan pengasuhan anak, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam koperasi, UMKM, pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif.

5) Terwujudnya Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan

Tujuan kelima merupakan penjabaran Misi V, yaitu membangun ekonomi rakyat yang berdaya saing, mengelola sumber daya alam secara adil dan lestari, serta memastikan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **5,20 persen**, meningkat dari 5,00 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, yaitu mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan desa-desa dan sentra produksi.

Sasaran yang mendukung tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatkan ekonomi masyarakat secara inklusif

Rasio Gini pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **0,190**, dari 0,196 pada 2025. Penurunan tersebut menunjukkan arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ditargetkan meningkat menjadi **50,67 persen**, dari 37,71 persen pada 2025.

Peningkatan kepesertaan jaminan sosial penting karena sebagian besar pekerja berada pada sektor informal, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil, dan jasa. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pendapatan, dan hari tua menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi inklusif.

b) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **30,54 persen**, dari 31,59 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga masih perlu memperoleh perhatian serius.

Kebijakan harus diarahkan pada peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi konsumsi, pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, penyediaan benih, pupuk dan alat produksi, peningkatan penyuluhan, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan pascapanen, penguatan cadangan pangan, serta stabilisasi harga dan distribusi pangan antarpulau.

c) Meningkatkan kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **76,58 poin**, meningkat dari 76,21 poin pada 2025. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah ditargetkan mencapai **66,02 persen**, meningkat dari 65,48 persen.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, daya dukung lingkungan, perlindungan kawasan pesisir, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, pengelolaan sampah, serta perlindungan ekosistem laut dan hutan. Pengelolaan lingkungan harus terintegrasi sejak tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan.

d) Terwujudnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Indeks Risiko Bencana pada tahun 2026 ditargetkan menurun menjadi **178,04 poin**, dari 178,22 poin pada 2025. Penurunan nilai indeks menunjukkan arah perbaikan, tetapi tingkat risiko yang masih tinggi memerlukan penguatan mitigasi gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi, abrasi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Upaya pengurangan risiko bencana perlu meliputi pemetaan kawasan rawan, penguatan sistem peringatan dini, pembangunan jalur dan tempat evakuasi, penerapan standar bangunan tahan bencana, peningkatan kapasitas desa tangguh bencana, penyediaan logistik, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur.

6) Menguatnya Kerukunan dan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat

Tujuan keenam merupakan penjabaran Misi VI, yaitu mendorong masyarakat Pulau Taliabu yang berakhlak mulia, berbudaya, dan toleran. Tujuan ini menempatkan stabilitas sosial, nilai keagamaan, kebudayaan, solidaritas, dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan daerah.

Dalam dokumen RPJMD, Indeks Demokrasi Indonesia dicantumkan sebagai indikator tujuan, tetapi target tahunannya belum tersedia. Oleh karena itu, pengukuran tahun 2026 perlu diperkuat melalui indikator yang tersedia dan relevan, seperti kerukunan antarumat beragama, konflik sosial, partisipasi masyarakat, pelestarian kebudayaan, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Sasaran utama tujuan ini adalah **terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman**. Angka kriminalitas pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **9,02 kejadian per 100.000 penduduk**, dari 9,33 pada 2025. Penurunan kriminalitas perlu didukung melalui pencegahan konflik, penguatan keamanan lingkungan, pendidikan karakter, perlindungan perempuan dan anak, penanganan penyalahgunaan narkoba, pembinaan generasi muda, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

Nilai lokal **Hemungsia Sia Dufu**, yang bermakna bersatu untuk menjadi satu, perlu ditempatkan sebagai modal sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

7) Terwujudnya Sektor Maritim yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Tujuan ketujuh merupakan penjabaran Misi VII, yaitu meningkatkan potensi dan membangun fasilitas yang menunjang produktivitas sektor maritim. Tujuan ini sangat strategis mengingat karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai **2,58 persen**, meningkat dari 2,21 persen pada 2025. Peningkatan tersebut harus ditopang oleh produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, ketersediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan fasilitas pendaratan ikan, penyediaan es dan rantai dingin, pengolahan hasil, peningkatan akses pasar, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

Sasaran utama tujuan ini adalah meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan. Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar **100,17**. Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan nelayan secara relatif masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Namun, target tahun 2026 lebih rendah daripada target 2025 sebesar 107,89 sehingga memerlukan perhatian terhadap biaya bahan bakar, alat tangkap, es, transportasi, ketergantungan terhadap pedagang perantara, perubahan musim, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga ikan.

Kebijakan sektor maritim perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sekaligus pengendalian biaya produksi, stabilisasi harga, penguatan kelembagaan nelayan, akses pembiayaan, perlindungan jaminan sosial, pengembangan koperasi, peningkatan mutu produk, dan pembangunan industri pengolahan skala lokal.

Arah Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tahun 2026 memiliki posisi strategis sebagai tahap penguatan fondasi dan percepatan awal pencapaian target jangka menengah. Evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2026 perlu digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara target dan realisasi, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menentukan penyesuaian kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pencapaian tujuan dan sasaran tidak dapat dilakukan secara sektoral. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan infrastruktur dasar dan pengurangan kemiskinan; peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan konektivitas dan SDM berkualitas; pengembangan sektor maritim memerlukan pelabuhan, energi, telekomunikasi dan akses pasar; sedangkan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan tata ruang, lingkungan dan risiko bencana.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu diarahkan pada program yang memiliki kontribusi paling kuat terhadap indikator tujuan dan sasaran RPJMD. Penentuan prioritas anggaran harus mempertimbangkan besarnya kesenjangan capaian, urgensi permasalahan, jumlah penduduk penerima manfaat, keterkaitan antarprogram, kesiapan pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaat. Setiap perangkat daerah juga perlu memastikan konsistensi antara indikator RPJMD, indikator Renstra, target Renja, subkegiatan, lokasi, keluaran, hasil, dan alokasi anggaran.

Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan keluaran fisik dan administratif, tetapi juga memberikan perubahan nyata berupa peningkatan kualitas hidup, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, perbaikan pelayanan publik, peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi rakyat, pelestarian lingkungan, peningkatan keamanan, serta berkembangnya sektor maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2026
1	Misi I: Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing melalui pembangunan sektor pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu	Usia Harapan Hidup	63,63 tahun
2	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu	Angka Kematian Ibu	737 per 100.000 kelahiran hidup
3	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional–Literasi Membaca SD	48,67 poin
4	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional–Literasi Membaca SMP	50,29 poin

5	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional–Numerasi SD	46,76 poin
6	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional–Numerasi SMP	52,00 poin
7	Misi I	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	64,08 poin	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah	12,90 tahun
8	Misi II: Membangun dan meningkatkan tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang amanah, mengayomi, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Indeks Reformasi Birokrasi	C	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,14%
9	Misi II	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	C	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan	2,16 poin

		n yang lebih baik				Berbasis Elektronik	
10	Misi III: Membangun dan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan yang terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,55 poin	Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	34,49%
11	Misi III	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,55 poin	Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	77,46%
12	Misi III	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,55 poin	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan hunian layak	41,85%
13	Misi III	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,55 poin	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum	88,05%
14	Misi III	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,55 poin	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	70,89%

15	Misi IV: Membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pusat-pusat strategis ekonomi, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pengurangan hambatan distribusi barang dan jasa	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	6,63%	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,51%
16	Misi IV	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	6,63%	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,09%
17	Misi IV	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	6,63%	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia secara inklusif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48,74%
18	Misi V: Membangun dan meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing serta pengelolaan sumber daya alam yang adil dan Lestari	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif	Rasio Gini	0,190 poin
19	Misi V	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial	50,67%

						Ketenaga kerjaan	
20	Misi V	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	30,54%
21	Misi V	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,58 poin	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	66,02%
22	Misi V	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,58 poin	Terwujudnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	178,04 poin
23	Misi VI: Mendorong masyarakat Taliabu yang berakhlak mulia, berbudaya, dan toleran	Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	Belum ditetapkan	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Angka kriminalitas	9,02 per 100.000 penduduk
24	Misi VII: Meningkatkan potensi dan membangun fasilitas penunjang produktivitas sektor maritim	Terwujudnya sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58%	Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan	Nilai Tukar Nelayan	100,17 poin

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi Kabupaten MUDA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pemerataan infrastruktur berbasis kepulauan, penguatan ekonomi rakyat dan sektor maritim, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Sasaran tersebut ditunjukkan antara lain oleh target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,08 poin, tingkat kemiskinan 6,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,20 persen, Indeks Pembangunan Infrastruktur 62,55 poin, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 76,58 poin.

Prioritas pembangunan daerah tersebut diselaraskan dengan prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, terutama pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan, transformasi ekonomi yang inklusif, pemerataan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, ketahanan lingkungan dan bencana, serta penguatan harmoni sosial. Pada tingkat nasional, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu mendukung RKP Tahun 2026 bertema “**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”, khususnya melalui penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas wilayah kepulauan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Keselarasan tersebut memastikan pembangunan kabupaten berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1 Prioritas Nasional dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Prioritas Nasional dan sasaran pembangunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1 meliputi:

- a) Indeks Demokrasi Indonesia dengan target sebesar **82,12–85,66**; dan
- b) Indeks Hak Asasi Manusia dengan target sebesar **2,80**.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2 meliputi:

- a) Asia Power Index pada aspek *Military Capability* dengan target sebesar **17,0**;
- b) Asia Power Index pada aspek *Diplomatic Influence* dengan target sebesar **63,4**;
- c) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dengan target sebesar **68,00 persen**;
- d) Global Cybersecurity Index dengan target sebesar **95**;
- e) Indeks Keamanan Laut Nasional dengan target sebesar **61**;
- f) Indeks Ketahanan Pangan dengan target sebesar **75,4**;
- g) Pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan target sebesar **2,8–3,1 persen**;
- h) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dengan target sebesar **6,55 persen**;
- i) Indeks Ketahanan Energi dengan target sebesar **6,82**;
- j) Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer dengan target sebesar **16–20 persen**;
- k) Indeks Ketahanan Air Nasional dengan target sebesar **3,50**;
- l) Kapasitas tampungan air dengan target sebesar **59,39 m³ per kapita**;
- m) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dengan target sebesar **42,24 persen**;
- n) Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman dengan target sebesar **17,00 persen**;
- o) Posisi ekonomi syariah Indonesia pada tingkat global dengan target **peringkat ke-3**;
- p) Indonesia Blue Economy Index (IBEI) dengan target sebesar **41,26**;
- q) Daya saing digital Indonesia pada tingkat global dengan target **peringkat ke-41**;

- r) Indeks Ekonomi Hijau dengan target sebesar **71,80**;
- s) Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah dengan target sebesar **60,00**;
- t) Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dengan target sebesar **28,00 persen**, termasuk **17,00 persen** sampah terdaur ulang;
- u) Penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif dengan target sebesar **19,07 persen**;
- v) Penurunan emisi gas rumah kaca secara tahunan dengan target sebesar **27,35 persen**;
- w) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan target sebesar **0,47**; dan
- x) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar **76,67**.

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3 meliputi:

- a) Rasio stok infrastruktur terhadap PDB dengan target sebesar **47,00 persen**;
- b) Rasio total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan target sebesar **188,60 persen**;
- c) Rasio aset perbankan terhadap PDB dengan target sebesar **64,51 persen**;
- d) Rasio aset dana pensiun terhadap PDB dengan target sebesar **7,63 persen**;
- e) Rasio aset asuransi terhadap PDB dengan target sebesar **9,30 persen**;
- f) Rasio kapitalisasi pasar modal terhadap PDB dengan target sebesar **59,90 persen**;
- g) Rasio total kredit terhadap PDB dengan target sebesar **38,46 persen**;
- h) Tingkat inklusi keuangan dengan target sebesar **91,50 persen**;
- i) Proporsi penciptaan lapangan kerja formal dengan target sebesar **37,95 persen**;
- j) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dengan target sebesar **1,12 persen**;
- k) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah dengan target sebesar **3,15 persen**;
- l) Rasio kewirausahaan dengan target sebesar **3,18 persen**;
- m) Rasio PDB pariwisata dengan target sebesar **4,60–4,70 persen**;
- n) Devisa pariwisata dengan target sebesar **22,00–24,70 miliar dolar Amerika Serikat**; dan
- o) Proporsi PDB ekonomi kreatif dengan target sebesar **7,40–8,00 persen**.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4 meliputi:

- a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan target sebesar **9,45 tahun**;
- b) Harapan lama sekolah dengan target sebesar **13,56 tahun**;
- c) Hasil Programme for International Student Assessment (PISA), terdiri atas:
 - kemampuan membaca dengan target nilai **396**;
 - kemampuan matematika dengan target nilai **404**; dan
 - kemampuan sains dengan target nilai **416**.
- d) Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional, terdiri atas:
 - literasi membaca dengan target nilai **65,89**; dan
 - numerasi dengan target nilai **58,80**.
- e) Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi dengan target sebesar **34,92 persen**;
- f) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dengan target sebesar **11,49 persen**;
- g) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dengan target sebesar **68,50 persen**;
- h) Usia Harapan Hidup dengan target sebesar **74,68 tahun**;
- i) Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* dengan target sebesar **2,10**;

- j) Angka Kematian Ibu dengan target sebesar **109 per 100.000 kelahiran hidup**;
- k) Prevalensi stunting pada balita dengan target sebesar **17,80 persen**;
- l) Insidensi tuberkulosis dengan target sebesar **252 per 100.000 penduduk**;
- m) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan target sebesar **98,70 persen**;
- n) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dengan target sebesar **73,83**;
- o) Indeks Perlindungan Anak dengan target sebesar **72,33**;
- p) Indeks Pembangunan Pemuda dengan target sebesar **67,24**;
- q) Indeks Ketimpangan Gender dengan target sebesar **0,394**;
- r) Indeks Pembangunan Gender dengan target sebesar **92,11–92,21**;
- s) Mobilitas penduduk lanjut usia dengan target sebesar **94,50 persen**;
- t) Mobilitas penduduk penyandang disabilitas dengan target sebesar **69,50 persen**;
- u) Posisi Indonesia dalam Indeks Inovasi Global dengan target **peringkat ke-52**;
- v) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar **4,44–4,96 persen**;
- w) Pengeluaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan target sebesar **0,31 persen terhadap PDB**;
- x) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan target sebesar **56,40 persen**;
- y) Peringkat Indonesia dalam Asian Games dengan target **peringkat 9–11**;
- z) Peringkat Indonesia dalam Asian Para Games dengan target **peringkat 5–7**;
- aa) Peringkat Indonesia dalam ASEAN Para Games dengan target **peringkat 1–2**; dan
- bb) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga dengan target sebesar **10,80–11,94 persen**.

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 meliputi:

- a) Rasio PDB industri pengolahan dengan target sebesar **21,20 persen**;
- b) Biaya logistik dengan target sebesar **13,30 persen terhadap PDB**;
- c) Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan target sebesar **29,00 persen terhadap PDB**; dan
- d) Ekspor barang dan jasa dengan target sebesar **22,00 persen terhadap PDB**.

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6 meliputi:

- a) Tingkat kemiskinan dengan target sebesar **6,5–7,5 persen**;
- b) Tingkat kemiskinan ekstrem dengan target sebesar **0–0,5 persen**;
- c) Proporsi penduduk kelas menengah dengan target sebesar **18,20 persen**;
- d) Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan target sebesar **34,99 persen**;
- e) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dengan target sebesar **10,40 persen**;
- f) Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan target sebesar **68,66 persen**;
- g) Proporsi desa mandiri dengan target sebesar **23,91 persen**;
- h) Proporsi PDRB wilayah perkotaan terhadap PDB nasional dengan target sebesar **57,70 persen**; dan
- i) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional dengan target sebesar **44,58 persen**.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 meliputi:

- a) Indeks Pembangunan Hukum dengan target sebesar **0,70**;
- b) Indeks Persepsi Korupsi dengan target sebesar **40**;
- c) Indeks Integritas Partai Politik dengan target sebesar **84,01–86,49**;
- d) Indeks Materi Hukum dengan target sebesar **0,52**;
- e) Indeks Integritas Nasional dengan target sebesar **74,52**;
- f) Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dengan target sebesar **75,80**;
- g) Indeks Pemerintah Digital dengan target sebesar **3,17**;
- h) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar **4,18**;
- i) Indeks Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dengan target sebesar **97,0**;
- j) Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan target sebesar **1,70 persen**;
- k) Return on Assets BUMN dengan target sebesar **3,26 persen**;
- l) Rasio pendapatan negara terhadap PDB dengan target sebesar **11,71–12,31 persen**;
- m) Rasio perpajakan terhadap PDB dengan target sebesar **10,08–11,54 persen**; dan
- n) Tingkat inflasi dengan target sebesar **2,5±1,0 persen**.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8 meliputi:

- a) Indeks Pembangunan Masyarakat dengan target sebesar **66,15**;
- b) Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan target sebesar **58,89**;
- c) Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target sebesar **77,11**; dan
- d. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB dengan target sebesar **0,136 persen**.

Pencapaian delapan Prioritas Nasional tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026. Penyelarasan terutama diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, penguatan konektivitas dan pelayanan dasar wilayah kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan UMKM, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sumber: [Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026](#) dan [Lampiran I RKP Tahun 2026](#).

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Penyelarasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 mengangkat tema “**Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi.**” Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, reformasi birokrasi, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan harmoni sosial dan kebudayaan.

Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Prioritas Pembangunan dan Sasaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas Provinsi
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan	1 Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan pendidikan 2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah serta pendidikan khusus. 3 Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. 5 Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk penguatan pelayanan rumah sakit rujukan daerah. 6 Memperluas cakupan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. 7 Meningkatkan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran dan integrasi data sosial ekonomi. 8 Memperkuat pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam pembangunan. 9 Mendukung pelaksanaan pemberian makanan bergizi bagi peserta didik, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok sasaran lainnya. 10 Memperkuat ekosistem pendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok daerah.
2	Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	1 Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan. 2 Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui bantuan sarana produksi, alat tangkap ramah lingkungan, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan usaha perikanan. 3 Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan kesempatan kerja. 4 Mengembangkan koperasi dan UMKM berbasis komoditas lokal, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan masyarakat. 5 Meningkatkan kualitas destinasi, aksesibilitas, amenitas, promosi, dan kapasitas pelaku pariwisata daerah. 6 Meningkatkan investasi daerah yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat lokal. 7 Memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. 8 Mengendalikan inflasi daerah melalui penguatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 9 Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi tenaga kerja, dan partisipasi angkatan kerja perempuan serta kelompok rentan.

3	Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan serta infrastruktur dasar	1 Meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana transportasi darat dan laut. 2 Meningkatkan akses jalan menuju sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kawasan ekonomi potensial. 3 Memperluas jaringan listrik dan telekomunikasi, terutama pada wilayah kepulauan, kawasan terpencil, dan daerah yang masih mengalami <i>blank spot</i>. 4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak, air bersih, dan sanitasi berkelanjutan. 5 Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan. 6 Mempercepat penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 7 Mengembangkan kawasan Sofifi–Halmahera sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, permukiman, dan pertumbuhan ekonomi baru. 8 Meningkatkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antarpulau serta antarkabupaten/kota. 9 Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah	1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. 3 Mempercepat transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu. 4 Meningkatkan profesionalitas, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur sipil negara. 5 Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan berbasis data serta berorientasi hasil. 6 Mendorong inovasi daerah dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 7 Memperkuat pengelolaan pendapatan, belanja, aset, dan pengawasan keuangan daerah. 8 Meningkatkan integrasi data pembangunan dan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
5	Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air, udara, tanah, serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut. 2 Memperkuat pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, termasuk pengembangan sistem pengelolaan sampah regional. 3 Meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah serta penerapan ekonomi sirkular pada

		kawasan perkotaan, permukiman, dan destinasi wisata. 4 Meningkatkan perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, dan keanekaragaman hayati. 5 Meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca. 6 Meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana. 7 Memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. 8 Mengintegrasikan aspek risiko bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
6	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial	1 Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan serta kearifan lokal Maluku Utara. 2 Meningkatkan pelestarian cagar budaya, kesenian tradisional, bahasa daerah, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat. 3 Mengembangkan ekonomi kreatif dan kewirausahaan yang berbasis seni, budaya, serta produk unggulan masyarakat lokal. 4 Meningkatkan kerukunan antarumat beragama, toleransi, gotong royong, dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. 5 Memperkuat peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga persatuan daerah. 6 Meningkatkan perlindungan sosial dan dukungan terhadap rumah ibadah, tokoh keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan. 7 Meningkatkan pembinaan kepemudaan, olahraga, kreativitas, dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. 8 Meningkatkan pencegahan konflik sosial serta memperkuat deteksi dini dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. 9 Memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan ketahanan sosial masyarakat.

Pelaksanaan keenam prioritas tersebut ditopang oleh program aksi kepala daerah yang diarahkan pada pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi; peningkatan konektivitas jalan dan jembatan; pembangunan jalan tani; penyediaan rumah layak huni; air bersih dan sanitasi; pengembangan kawasan Sofifi–Halmahera; peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan; penguatan ekosistem makanan bergizi; pemberdayaan perempuan dan pemuda; transformasi birokrasi digital; bantuan sarana produksi bagi nelayan; pengembangan destinasi pariwisata; penguatan UMKM berbasis budaya; ketahanan pangan dan pengendalian harga; serta pengelolaan sampah regional.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan konektivitas antardesa dan antarpulau, penyediaan listrik dan telekomunikasi, akses air minum dan

sanitasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, penguatan UMKM, penurunan kemiskinan dan stunting, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, prioritas RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 perlu diselaraskan secara substantif dengan prioritas provinsi agar tercipta kesinambungan program, kejelasan pembagian kewenangan, dan efektivitas dukungan pendanaan pembangunan.

Sumber utama: [Bappeda Provinsi Maluku Utara—Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026](#), [Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026](#), dan [RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029](#).

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi **“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara,”** maka pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan **7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah.**

Tahun 2026 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dengan fokus **“Fondasi MUDA: Pemenuhan Layanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan.”** Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemerataan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan hidup, penguatan kehidupan sosial budaya, serta peningkatan produktivitas sektor maritim.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia, dan Berdaya Saing

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
- b) membangun, merehabilitasi, dan melengkapi sarana serta prasarana pendidikan, khususnya pada wilayah terpencil dan kepulauan;
- c) meningkatkan kompetensi dan pemerataan distribusi guru serta tenaga kependidikan pada seluruh kecamatan;
- d) meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mencegah terjadinya anak putus sekolah;
- e) meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, dan kecakapan digital peserta didik;
- f) memperkuat pendidikan karakter, keagamaan, kebudayaan, dan kearifan lokal;
- g) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan pelayanan kesehatan berbasis desa;
- h) memperkuat pelayanan kesehatan rujukan melalui peningkatan kapasitas RSUD Bobong;
- i) meningkatkan ketersediaan, kompetensi, dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga gizi;

- j) mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- k) meningkatkan cakupan kepesertaan dan keaktifan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- l) meningkatkan pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok rentan;
- m) mendukung pemberian makanan bergizi bagi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok sasaran lainnya dengan memanfaatkan bahan pangan lokal; dan
- n) mengembangkan pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-4**, yaitu *Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas*; dan
- **Prioritas Nasional ke-6**, yaitu *Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkeadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dilaksanakan secara tepat sasaran, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
- b) memperkuat konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD;
- c) meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- d) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e) meningkatkan kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- f) meningkatkan kompetensi, profesionalitas, kedisiplinan, integritas, dan produktivitas aparatur sipil negara;
- g) menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara;
- h) mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i) mengembangkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, inklusif, dan terintegrasi;
- j) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan dasar lainnya;
- k) memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral dan kebijakan Satu Data Kabupaten Pulau Taliabu;
- l) meningkatkan pengawasan internal, pengendalian risiko, pencegahan korupsi, dan transparansi pengadaan barang dan jasa;

m) memperkuat kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan

n) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-7**, yaitu *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*; dan
- **Prioritas Nasional ke-1**, yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya mempercepat pemenuhan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, mengurangi keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas penduduk, serta memperlancar mobilitas barang dan jasa.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

a) melanjutkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten, termasuk jalan lingkar Pulau Taliabu;

b) meningkatkan kualitas koridor jalan Bobong–Kawalo, Tikong–Nunca, Tabona–Wahe, dan Waikoka–Samuya;

c) membangun dan memelihara jembatan, drainase, talud, gorong-gorong, dan bangunan pelengkap jalan;

d) meningkatkan pembangunan jalan menuju sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan kawasan ekonomi potensial;

e) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan serta fasilitas pelayanan publik;

f) meningkatkan pelayanan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, instalasi pengolahan air, SPAM, jaringan perpipaan, dan bendungan mikro;

g) meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi aman;

h) meningkatkan penataan lingkungan permukiman, kawasan perkotaan, dan kawasan kumuh;

i) meningkatkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

j) meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan permukiman;

k) meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;

l) meningkatkan kualitas pelabuhan dan dermaga di Bobong, Tikong, Lede, Nggele, Losseng, Penu, Parigi, dan wilayah strategis lainnya;

m) memperkuat fungsi Pelabuhan Bobong sebagai simpul logistik dan perdagangan serta Pelabuhan Tikong sebagai pelabuhan pengumpan kegiatan ekonomi wilayah utara;

n) memperluas pelayanan energi listrik melalui peningkatan kapasitas PLTD, pengembangan PLTS, dan penguatan jaringan distribusi;

- o) memperluas jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya pada desa yang masih mengalami keterbatasan sinyal;
- p) meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, abrasi, longsor, dan bencana hidrometeorologi;
- q) menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi, sistem peringatan dini, dan sarana penanggulangan bencana; dan
- r) menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-3**, yaitu *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi*;
- **Prioritas Nasional ke-2**, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan energi, air, ketahanan pangan, dan ekonomi digital; serta
- **Prioritas Nasional ke-6**, khususnya dalam pemerataan pembangunan desa dan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi melalui Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Komoditas Unggulan

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi diarahkan berdasarkan potensi setiap wilayah dengan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, pariwisata, koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) mengembangkan kawasan Bobong–Holbota–Kramat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi primer;
- b) mengembangkan kawasan Kramat–Lede–Tikong sebagai pusat perkebunan, perdagangan, dan kegiatan ekonomi wilayah utara;
- c) mengembangkan kawasan Tikong–Gela–Samuya sebagai pusat kegiatan maritim, perikanan, budaya, dan pertambangan terkendali;
- d) mengembangkan kawasan Bobong–Kawalo–Waikoka–Samuya sebagai koridor logistik dan industri agro;
- e) mengembangkan koridor Tabona–Wahe dan Waikadai–Tubang untuk membuka konektivitas dan pusat pertumbuhan baru;
- f) meningkatkan produksi dan produktivitas padi, hortikultura, kelapa, cengkeh, pala, kakao, dan komoditas perkebunan rakyat lainnya;
- g) meningkatkan penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, penyuluhan, irigasi, jalan usaha tani, serta sarana pascapanen;
- h) memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal, cadangan pangan, diversifikasi konsumsi, dan stabilisasi harga;

- i) meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, permodalan, legalitas usaha, sertifikasi, kemasan, dan pemasaran digital;
- j) mendorong hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah;
- k) meningkatkan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal;
- l) mengembangkan destinasi pariwisata bahari, alam, budaya, dan pariwisata berbasis masyarakat;
- m) meningkatkan fasilitas pasar, pergudangan, distribusi, dan sarana perdagangan;
- n) memperkuat pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif; dan
- o) meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin serta kelompok rentan.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-3**, terutama dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, dan agromaritim;
- **Prioritas Nasional ke-5**, yaitu *Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri*;
- **Prioritas Nasional ke-6**, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan; dan
- **Prioritas Nasional ke-2**, khususnya dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

5. Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan

Prioritas ini ditetapkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi rakyat diarahkan pada penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pengelolaan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) meningkatkan pengawasan pengelolaan pertambangan agar sesuai dengan rencana tata ruang dan dokumen lingkungan;
- b) mendorong reklamasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan pada kawasan pascatambang;
- c) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan hutan, dan kawasan lindung;
- d) memperkuat perlindungan terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, daerah aliran sungai, dan ekosistem pesisir;
- e) melindungi wilayah tangkap tradisional serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan;
- f) meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengurangan dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan penanganan tempat pemrosesan akhir;
- g) meningkatkan pengendalian pencemaran air, udara, tanah, serta wilayah pesisir dan laut;

- h) mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga surya, untuk memperkuat ketahanan energi wilayah terpencil;
- i) meningkatkan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana;
- j) meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, pesisir, dan wilayah pedalaman melalui permodalan mikro, teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur dasar;
- k) mengembangkan ekonomi hijau berbasis pertanian, perkebunan, hortikultura, dan pariwisata berkelanjutan;
- l) mengembangkan ekonomi biru berbasis perikanan, kelautan, konservasi pesisir, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan; dan
- m) mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup, ketahanan iklim, dan pengurangan risiko bencana dalam seluruh tahapan pembangunan.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-2**, terutama dalam pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, energi terbarukan, pengelolaan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan keanekaragaman hayati;
- **Prioritas Nasional ke-5**, terutama dalam hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
- **Prioritas Nasional ke-8**, yaitu *Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur*.

6. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Damai, dan Toleran

Prioritas ini ditetapkan untuk memperkuat karakter masyarakat, identitas kebudayaan Taliabu, kerukunan antarumat beragama, ketenteraman, dan harmoni sosial. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, saling menghormati, dan memiliki solidaritas sosial.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) memperkuat pendidikan karakter, nilai moral, keagamaan, toleransi, dan kearifan lokal;
- b) melindungi dan mengembangkan bahasa, tradisi, kesenian, sejarah, dan kebudayaan masyarakat Taliabu;
- c) mengembangkan pusat kegiatan seni dan budaya di Bobong dan wilayah potensial lainnya;
- d) menyelenggarakan festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan promosi kebudayaan daerah;
- e) mengembangkan kurikulum muatan lokal serta dokumentasi pengetahuan dan kebudayaan Taliabu;
- f) menyediakan ruang publik dan fasilitas kreatif bagi generasi muda untuk mengembangkan seni, budaya, olahraga, teknologi, dan inovasi;
- g) meningkatkan dialog lintas agama, forum sosial, kegiatan adat, dan kegiatan kemasyarakatan;
- h) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan;

- i) memperkuat pencegahan konflik sosial, deteksi dini, dan penyelesaian konflik berdasarkan musyawarah dan kearifan lokal;
- j) meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- k) memperkuat peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda dalam pembangunan; dan
- l) mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan komunitas untuk memperkuat identitas sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-1**, terutama dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kehidupan sosial yang inklusif;
- **Prioritas Nasional ke-4**, khususnya dalam penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pendidikan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- **Prioritas Nasional ke-8**, terutama dalam pembangunan kebudayaan, peningkatan kerukunan umat beragama, dan penguatan kehidupan yang harmonis dengan budaya serta lingkungan.

7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Maritim

Prioritas ini ditetapkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu. Pembangunan sektor maritim diarahkan untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, pendapatan nelayan, kesempatan kerja, serta keterhubungan produk perikanan dengan pasar regional.

Prioritas ini dilaksanakan dengan cara:

- a) meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana pendaratan ikan di Bobong, Pancado, Tabona, Tikong, dan wilayah potensial lainnya;
- b) mengembangkan Pelabuhan Bobong, Pancado, dan Tikong sebagai simpul produksi, distribusi, dan perdagangan perikanan;
- c) meningkatkan penyediaan perahu, mesin, alat tangkap ramah lingkungan, sarana keselamatan, dan fasilitas pendukung nelayan;
- d) meningkatkan kapasitas *cold storage*, pabrik es, tempat pelelangan ikan, pasar ikan higienis, dan sarana pengolahan hasil perikanan;
- e) memperkuat rantai dingin dan sistem logistik perikanan yang terhubung dengan jaringan jalan, pelabuhan, dan pasar regional;
- f) mengembangkan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- g) mengembangkan desa nelayan modern dengan dukungan sarana produksi, pengolahan, pemasaran, pelayanan dasar, dan kelembagaan ekonomi;
- h) meningkatkan pelatihan, penyuluhan, sertifikasi, perlindungan, dan keselamatan kerja nelayan;
- i) memperkuat koperasi nelayan dan akses terhadap pembiayaan, asuransi, serta kemitraan usaha;
- j) mendorong hilirisasi ikan dan hasil laut menjadi produk olahan bernilai tambah;
- k) meningkatkan mutu, keamanan pangan, kemasan, sertifikasi, dan pemasaran produk perikanan;

l) memperluas pemasaran melalui digitalisasi dan kerja sama perdagangan dengan wilayah Maluku Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya;

m) meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mencegah penangkapan ikan yang merusak; dan

n) meningkatkan perlindungan ekosistem pesisir sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian masyarakat nelayan.

Prioritas daerah ini selaras dengan:

- **Prioritas Nasional ke-2**, terutama dalam pengembangan ekonomi biru, ketahanan pangan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- **Prioritas Nasional ke-3**, terutama dalam pengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- **Prioritas Nasional ke-5**, terutama dalam hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah; dan
- **Prioritas Nasional ke-6**, terutama dalam pembangunan desa, pemerataan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Ketujuh prioritas tersebut merupakan satu kesatuan pembangunan yang saling berkaitan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi, pembangunan infrastruktur menjadi pengungkit konektivitas dan pelayanan dasar, sedangkan pengembangan ekonomi lokal dan sektor maritim menjadi sumber pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, ketahanan bencana, kebudayaan, dan harmoni sosial untuk mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu yang mandiri, unggul, damai, adaptif, dan maju.

Tabel 4.7 Perubahan Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Perubahan target utama pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi awal pembangunan Tahun 2025, target RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, perkembangan indikator makroekonomi dan sosial, kapasitas fiskal daerah, serta perkiraan capaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2026. Penyesuaian target diarahkan agar indikator pembangunan tetap realistis, terukur, dan dapat dicapai sampai dengan akhir Tahun 2026 tanpa mengurangi upaya percepatan pencapaian visi dan misi daerah.

Tabel 4.8
Perubahan Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD 2026	Perubahan Target 2026
1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,48	64,08	64,00
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,33	63,63	63,60

	masyarakat Pulau Taliabu					
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	799	737	700
1.1.2	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Nilai Asesmen Nasional—Literasi Membaca SD	Nilai	46,17	48,67	48,50
		Rata-rata Nilai Asesmen Nasional—Literasi Membaca SMP	Nilai	49,19	50,29	50,25
		Rata-rata Nilai Asesmen Nasional—Numerasi SD	Nilai	43,86	46,76	46,50
		Rata-rata Nilai Asesmen Nasional—Numerasi SMP	Nilai	50,50	52,00	52,00
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	12,90	12,90
2.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/Kategori	C	C	C
2.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,12	0,14	0,13
2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,94	2,16	2,16
3.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	61,25	62,55	62,00
3.1.1	Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	32,99	34,49	34,00
		Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	76,06	77,46	77,50
3.1.2	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	41,31	41,85	41,85
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum	Persen	86,91	88,05	88,00
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	68,99	70,89	70,50

4.1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,89	6,63	6,63
4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,40	1,51	1,50
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,07	0,09	0,09
4.1.2	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia secara inklusif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	48,37	48,74	48,70
5.1	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,20	6,00
5.1.1	Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif	Rasio Gini	Indeks	0,196	0,190	0,190
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	37,71	50,67	45,00
5.1.2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau <i>Prevalence of Undernourishment</i>	Persen	31,59	30,54	30,50
5.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,21	76,58	76,58
		Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	65,48	66,02	66,00
5.2.1	Terwujudnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	178,22	178,04	178,00
6.1	Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	—	—	—
6.1.1	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	9,33	9,02	9,00
7.1	Terwujudnya sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	2,21	2,58	3,00

7.1.1	Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	107,89	100,17	108,50
-------	---	---------------------	--------	--------	--------	--------

Sumber: RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029; RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026; hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Semester I Tahun 2026; diolah.

4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan antara Dokumen RKP, RKPD Provinsi Maluku Utara dengan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu

Keselaran tema dan prioritas pembangunan merupakan bagian penting dalam menjamin keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Pada Tahun 2026, prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi, dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan, serta potensi daerah. Keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, pendanaan, dan pencapaian sasaran pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan.



Selanjutnya untuk keselarasan target kinerja Sasaran Makro Nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 sebagai berikut.

4.8

TABEL 4.8 KESELARASAN SASARAN MAKRO NASIONAL, PROVINSI MALUKU UTARA DAN KABUPATEN PULAU TALIBU TAHUN 2026

Sinkronisasi target pembangunan dalam RKP, RPJMD Provinsi, dan Perubahan RKPD Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	TARGET 2026 NASIONAL	TARGET 2026 MALUKU UTARA	PERUBAHAN TARGET 2026 PULAU TALIBU
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20-5,80	12,10-13,80	6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50-7,50	3,00-4,50	6,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96	3,48-4,01	3,40*
4	Rasio Gini (nilai)	0,377-0,380	0,270-0,286	0,190
5	Indeks Pembangunan Manusia	n.a.**	73,01*	64,00
6	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,45	9,84-9,86	8,40*
7	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,56	14,08-14,09	12,90
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,68	71,79	63,60
9	PDRB/Pendapatan per Kapita (Rp juta, ADHB)	US\$5.520***	92,00	37,80*

* Proyeksi/usulan target Perubahan RKPD 2026 yang perlu divalidasi dengan data resmi terakhir.

** RKP 2026 menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM) dengan target 0,57, bukan IPM.

*** Target nasional menggunakan GNI per kapita; target provinsi dan kabupaten menggunakan PDRB per kapita.

Sumber: RKP 2026; RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029; RPJMD dan Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu, diolah.

Keselarasn prioritas pembangunan dilakukan untuk menjamin keterpaduan kebijakan, program, kegiatan, indikator, lokasi, dan pendanaan pembangunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Keselarasan prioritas pembangunan Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Taliabu

No.	Prioritas Nasional Tahun 2026	Prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2026	Prioritas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026
1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Provinsi 4: Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Prioritas Provinsi 6: Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial.	Prioritas Daerah 2: Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.
2	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Provinsi 2: Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Prioritas Provinsi 3: Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan serta infrastruktur dasar. Prioritas Provinsi 5: Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana.	Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan. Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.

3	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Provinsi 2: Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Prioritas Provinsi 3: Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan serta infrastruktur dasar.	Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan. Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.
4	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Provinsi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas Provinsi 6: Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial.	Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.
5	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Provinsi 2: Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.	Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan. Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.
6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Provinsi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas Provinsi 2: Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Prioritas Provinsi 3: Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan serta infrastruktur dasar.	Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan. Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi	Prioritas Provinsi 4: Mengakselerasi reformasi	Prioritas Daerah 2: Peningkatan tata kelola pemerintahan dan

	politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	birokrasi dan inovasi daerah. Prioritas Provinsi 6: Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial.	kualitas pelayanan publik. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.
8	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Prioritas Provinsi 5: Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana. Prioritas Provinsi 6: Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial.	Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.

Keselarasn prioritas pembangunan nasional dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 dilakukan untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keselarasan tersebut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.10 Keselarasan Prioritas Nasional, Kabupaten Pulau Taliabu dan Sasaran Daerah

No.	Prioritas Nasional Tahun 2026	Prioritas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026	Sasaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 2: Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.	a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan b. Meningkatnya kualitas pelayanan public c. Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan Masyarakat d. Terciptanya lingkungan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, demokrasi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan f. Meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

2	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan.Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan.Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.	a. Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah. b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, energi listrik, dan telekomunikasi. c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah. d. Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif e. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pangan lokal. f. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. g. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. h. Terwujudnya sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. i. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan. i. Meningkatnya ketahanan pangan serta berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan.Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan.Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.	a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan. b. Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah. c. Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah e. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia secara inklusif. f. Meningkatnya kesempatan kerja dan kewirausahaan masyarakat. g. Meningkatnya kapasitas koperasi, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif. h. Berkembangnya sentra produksi dan industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. i. Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan nelayan

			serta pelaku usaha sektor maritim.
4	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.	a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu. c. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting. d. Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata. e. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. f. Meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. g. Meningkatnya kompetensi dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan. h. Meningkatnya peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. i. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, dan kebudayaan.
5	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan. Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Prioritas Daerah 7: Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor maritim.	a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah. c. Meningkatnya rasio PDRB industri pengolahan. d. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan hasil hutan. e. Meningkatnya kapasitas industri kecil dan menengah berbasis bahan baku lokal. f. Meningkatnya kualitas, standardisasi, sertifikasi, kemasan, dan pemasaran produk daerah. g. Meningkatnya investasi yang menciptakan lapangan kerja dan memberikan

			manfaat bagi masyarakat lokal. h. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan. i. Berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan dan sistem rantai dingin. j. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.Prioritas Daerah 3: Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan.Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan.Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.	a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan dasar di desa dan wilayah terpencil. b. Meningkatnya konektivitas desa, antarkecamatan, dan antarwilayah kepulauan. c. Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. d. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. e. Menurunnya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial. f. Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif. g. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat desa, petani, pekebun, nelayan, dan UMKM. h. Meningkatnya kesempatan kerja dan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. i. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa. j. Meningkatnya kemandirian desa melalui pengembangan BUM Desa, koperasi, dan produk unggulan desa.
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas Daerah 2: Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.	a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. d. Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

			e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. f. Meningkatnya profesionalitas, kompetensi, disiplin, dan integritas aparatur. g. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan pencegahan korupsi. h. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. i. Menurunnya angka kriminalitas serta gangguan ketenteraman dan ketertiban. j. Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya.
8	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Daerah 5: Pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Prioritas Daerah 6: Penguatan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, damai, dan toleran.	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. b. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. c. Meningkatnya timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah. d. Meningkatnya perlindungan kawasan hutan, pesisir, laut, mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati. e. Terwujudnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana. f. Menurunnya Indeks Risiko Bencana. g. Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. h. Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. i. Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah. j. Meningkatnya kerukunan antarumat beragama, solidaritas sosial, dan pelestarian kearifan lokal.

Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin keterpaduan kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan pembangunan. Keselarasan tersebut juga menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

Tabel 4.11 Keselarasan Prioritas Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu dan Sasaran Daerah

No.	Prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2026	Prioritas Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026	Sasaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
1	Prioritas Provinsi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan	Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan komoditas unggulan.	a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. c. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. d. Menurunnya prevalensi stunting pada balita. e. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. f. Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata. g. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. h. Meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. i. Meningkatnya kompetensi serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. j. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia secara inklusif. k. Menurunnya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial. l. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
2	Prioritas Provinsi 2: Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan	Prioritas Daerah 4: Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat	a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.